

BAB III

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab pendahuluan dan bab deskripsi objek dari penelitian ini, ada beberapa indikator yang menjadi tolok ukur dalam penelitian. Pada bagian ini, akan dibahas dan dijelaskan bagaimana soliditas Partai Keadilan Sejahtera dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2014. Hasil penelitian dengan indikator yang dijadikan acuan dalam soliditas partai adalah sebagai berikut:

A. Kepemimpinan Prosedural

Terdapat dua parameter untuk mengukur indikator ini, yaitu struktur kepengurusan dan tokoh karismatik. Indikator kepemimpinan prosedural akan lebih spesifik menjelaskan mengenai proses pengambilan keputusan dalam struktur kepengurusan. Selain itu, bagian ini juga akan membahas mengenai sosok tokoh karismatik dalam PKS yang memiliki andil dalam soliditas partai.

1. Struktur Kepengurusan

Sebagai sebuah partai Islam yang mengklaim dirinya sebagai Partai Dakwah, *syura* yang dalam tradisi Islam artinya adalah mekanisme pengambilan keputusan, telah diformalkan dalam bentuk institusi Majelis Syura yang menempati posisi sentral dalam kiprah PKS, khususnya terkait dengan pengambilan keputusan-keputusan strategis. Dengan kata lain, Majelis Syura merupakan pemutus tertinggi untuk hal-hal yang sifatnya sangat strategis dan hal-hal lain yang tidak dapat diputuskan oleh institusi-institusi lain dalam lingkup partai. Di samping itu,

Majelis Syura merupakan forum evaluasi terhadap kebijakan dan program partai (Munandar, 2011: 228, 230-231).

Pengambilan keputusan di Majelis Syura dilakukan melalui mufakat atau aklamasi, walaupun tidak menutup kemungkinan dilakukan pemungutan suara jika mufakat atau aklamasi tidak dimungkinkan (MPP PKS, 2008: 592, 608-613). Di situasi lain, dalam pemilihan kader untuk menempati jabatan tertentu biasanya diambil melalui *voting*. Dengan kata lain, dalam tradisi pengambilan keputusan di PKS, *voting* adalah hal yang sangat biasa. Pelaksanaan musyawarah Majelis Syura di PKS pada dasarnya juga tidak berbeda dengan rapat atau musyawarah di organisasi-organisasi lainnya, di mana dijalankan berdasarkan agenda pertemuan yang sudah ditentukan sebelumnya, berisi diskusi dan perdebatan karena adanya beragam pendapat berbeda (Munandar, 2011: 232).

Menilik kasus yang menjerat Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq pada 2013 lalu, Majelis Syura PKS mengadakan rapat pasca Luthfi ditahan KPK pada Kamis, 31 Januari 2013. Saat rapat berlangsung, Luthfi yang ternyata masih bisa menghubungi Hilmi Aminudin, Ketua Majelis Syura, menyatakan bahwa ia mengundurkan diri dari jabatannya yang kemudian nantinya disusul dengan pernyataan tulis tangan. Dengan mundurnya Luthfi Hasan Ishaq, maka perlu segera diadakan pergantian struktur internal di posisi presiden PKS, sehingga forum akhirnya membahas pengganti Luthfi.

Proses pergantian tersebut berjalan cukup alot. Muncul nama-nama calon seperti Al Muzamil Yusuf, Sohibul Iman, Anis Matta, dan Hidayat Nur Wahid. Nama-nama tersebut diajukan oleh anggota Majelis Syura, di mana semua anggota

memang berhak memberikan nama. Kemudian, dari keempat nama itu mengerucut menjadi dua nama, yakni Anis Matta dan Hidayat Nur Wahid. Anis Matta yang merupakan sekjen PKS selama tiga periode, memiliki rekam jejak yang cukup baik. Hanya saja Anis sempat dikhawatirkan tersandung kasus hukum. Pasalnya, ia pernah diperiksa dalam kasus dugaan suap PPID (Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) pada awal tahun 2012 dengan tersangka Wa Ode Nurhayati. Sedangkan Hidayat sudah pernah menjabat sebagai Presiden PKS pada periode 2000-2004 (Tribunnews.com, 2 Februari 2013).

Diskusi tersebut berlangsung cukup alot sehingga dilanjutkan lagi pada 1 Februari 2013 hari Jumat hingga setelah shalat Jum'at dan akhirnya forum memutuskan memilih Anis Matta untuk menggantikan Luthfi, mengingat Anis terbukti tidak terlibat dalam kasus suap PPID. Setelah ditetapkan sebagai Presiden PKS, Anis Matta kemudian mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Ketua DPR RI dan keanggotaannya di DPR RI.

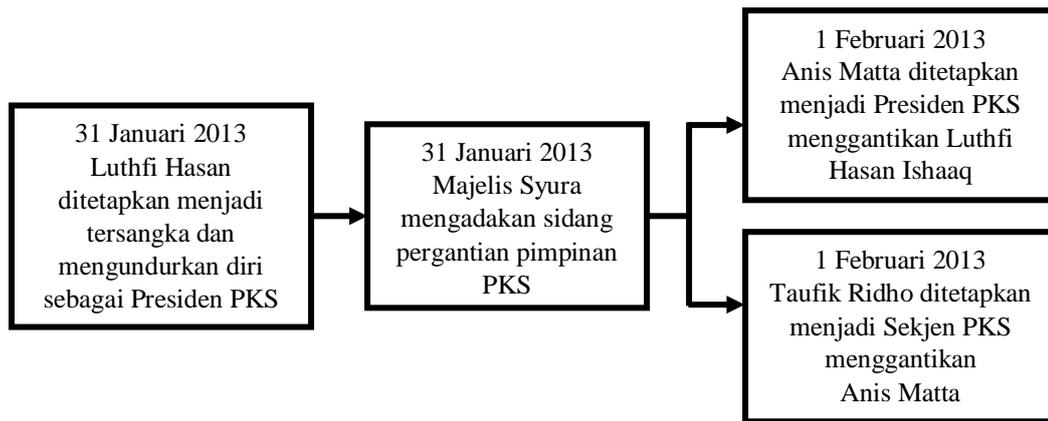
Ketua Majelis Syura memang memiliki peran yang dominan di PKS. Misalnya, ia berwenang mengajukan nama-nama Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Presiden, Sekjen, Bendahara Umum dan Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) untuk ditetapkan dalam musyawarah Majelis Syura. Di samping itu, Ketua Majelis Syura juga memimpin Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), atau Majelis Riqabah 'Amnah (MRA), yang berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura (MPP PKS, 2008: 592).

Pasca kasus Luhtfi, selain menunjuk Anis Matta sebagai Presiden PKS, rapat Dewan Tingkat Pimpinan Pusat PKS juga memutuskan pergantian struktur

internal lainnya. Sekretaris jenderal yang sebelumnya diisi oleh Anis Matta diganti oleh Muhammad Taufik Ridho. Diketahui sebelumnya, Taufik Ridho menjabat sebagai Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan. Hilmi mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah digelar rapat oleh Majelis Syura pada 31 Januari 2013, dan atas penetapan Sekjen DPP baru tersebut, maka akan dilaporkan ke Majelis Syura dalam musyawarah Majelis Syura mendatang (Kompas.com, 1 Februari 2013). Hal tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPP PKS Zulkieflimansyah sebagaimana dilansir oleh Detik.com (1 Februari 2013), bahwa Taufik Ridho merupakan orang kepercayaan Hilmi. Di samping itu, Taufik juga memiliki kemampuan yang cukup mumpuni karena ia adalah sosok yang pekerja keras sehingga pantas menjadi Sekjen PKS.

Berdasarkan penjelasan di atas yang telah diringkas pada gambar 3.1, bahwa mekanisme prosedural PKS dalam konteks jelang Pemilu 2014 lebih dikontrol secara penuh dan didominasi oleh Majelis Syura. Majelis Syura mempunyai peran sentral yang cukup kuat dalam penentuan pergantian internal partai yang dibuktikan dengan keterpilihan Anis Matta menjadi Presiden PKS menggantikan posisi Luthfi Hasan Ishaq dan Taufik Ridho menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKS menggantikan Anis Matta. Pemilihan dua kader terbaik PKS ini dilakukan dengan begitu cepat pasca penetapan LHI menjadi tersangka agar tidak ada kekosongan kekuasaan dan situasi internal partai kembali stabil.

Gambar 3.1 Keputusan Majelis Syura dalam Pergantian Struktur Kepengurusan



Sumber: Diolah oleh Penulis

Penjelasan di atas juga membuktikan bahwa PKS sebagai partai kader dalam mengisi jabatan kepemimpinan memilih sosok yang memiliki rekam jejak yang baik dan jam terbang tinggi di PKS. Berbeda dengan PKS, PKB yang pada 2014 merekrut Rusdi Kirana selaku Direktur Utama Lion Grup menjadi Wakil Ketua Umum PKB, membuat partai ini dinilai tidak lagi memiliki identitas yang jelas. Pasalnya, PKB dikenal sebagai partai Islam yang memiliki basis kuat di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama, sehingga strategi politik PKB dengan mengangkat pengusaha sebagai elite partai membuat partai tersebut tidak lagi mempunyai identitas yang kuat (Kompas.com, 13 Januari 2014).

2. Tokoh Karismatik

Sumber daya manusia merupakan hal yang fundamental dalam sebuah organisasi. Setiap individu menyumbangkan tenaga, pemikiran, dan kreativitasnya untuk organisasi dengan tujuan organisasi tersebut dapat terjaga eksistensinya. Di tengah banyaknya konflik dan isu negatif yang dapat memecah belah organisasi,

para anggota tentu berharap ada sosok pemersatu yang dapat memperkuat internalnya.

Di dalam sebuah partai politik, mustahil rasanya jika tidak ada problematika yang terjadi. Politik yang dinamis menghasilkan berbagai macam persoalan dan membuat partai membutuhkan simbol pemersatu yang dapat membawa dampak baik bagi partai. Ketika PKS mengalami guncangan hebat di Januari 2013, yakni suap impor daging sapi yang dilakukan oleh Presiden PKS kala itu Luthfi Hasan Ishaq, muncul “ramalan” yang menyebut bahwa PKS akan tenggelam di Pileg 2014. Luthfi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 30 Januari 2013, kemudian tak berselang lama Muhammad Anis Matta dipilih menjadi Presiden PKS menggantikan Luthfi Hasan Ishaq pada 1 Februari 2013.

Kemunculan Anis Matta di tengah badai politik yang menerpa PKS seperti membawa angin segar bagi internal partai. Menurut Anis sebagaimana yang dilansir oleh Republika.co.id (10 November 2013), badai tidak akan mematikan PKS, justru akan menguatkan PKS, dan tidak akan menyurutkan perjuangan kader-kader dalam memenangkan Pemilu 2014. Ia mengungkapkan bahwa masalah yang mendera partainya hanyalah jeda kecil yang hanya akan membawa pengaruh sedikit terhadap partai sebelum tumbuh lebih baik dan naik lebih tinggi lagi. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa ketika berkeliling untuk menemui kader di daerah, masih terlihat optimisme yang tinggi untuk membawa partai ke tingkat yang lebih baik.

Anis Matta berada di puncak kapasitas adrenalin yang penuh, pasca salah satu orang terdekatnya, Luthfi Hasan Ishaq, terjerat kasus suap. Setelah ditetapkan sebagai presiden, ia berbicara di hadapan publik bahwa apa yang dihadapi PKS

adalah sebuah konspirasi besar yang bertujuan menghancurkan partainya, sehingga ia ingin kasus tersebut dijadikan sebagai pembenahan diri sekaligus momentum kebangkitan PKS. Saat diundang di program Gestur TVOne (14 Maret 2013), Anis meluruskan bahwa kata konspirasi bukan ditujukan untuk pihak lain, melainkan untuk sekadar menenangkan kader-kader PKS yang kecewa dan marah atas apa yang telah terjadi.

“Ada kader yang kecewa, bingung, marah, mungkin juga ada orang yang pesta di sebelah sana, lalu ada juga audience di sebelah sana yang tidak tau tentang pesta ini dan tidak tau juga tentang kemarahan kader tetapi ingin tau apa yang sedang terjadi. Lalu saya bertanya pada diri saya sendiri, siapa yang paling ingin mendengarkan kalimat yang keluar dari saya. Saya kira kader,” ungkap Anis dalam program Gestur TVOne.

Menurut Anis, kader saat itu telah kehilangan tiga hal, yaitu harapan, kebanggaan kepada partainya sendiri, dan yang terpenting adalah kepercayaan diri. Tiga hal tersebut merupakan sebuah sumber energi yang membuat seseorang bisa bergerak dan bekerja, sehingga jika hal tersebut hilang maka orang akan lumpuh. Anis yang saat itu dipercaya dapat menyelamatkan partai kemudian menemukan satu kata yang dapat menghadirkan tiga hal itu kembali seketika dan memicu adrenalin kader untuk kembali berjuang. Kata konspirasi menurut Anis adalah yang paling tepat, walaupun kemudian banyak pihak yang menyayangkan Anis mengeluarkan kata tersebut karena terkesan menuduh apa yang dilakukan KPK terhadap LHI adalah sebuah konspirasi (Gestur TVOne, 14 Maret 2013).

Anis hadir untuk memberikan ketenangan dan melahirkan kekuatan baru untuk PKS. Ia mengajak seluruh kader dan simpatisan untuk tetap setia berjuang bersama PKS dalam Pemilu 2014 pasca persoalan yang melibatkan sejumlah petinggi partai, dan mengharapkan semangat dan solidaritas para kader untuk bisa

mencapai target partai di pemilu legislatif yakni masuk dalam tiga besar. Karena dengan begitu, PKS mampu membuktikan bahwa partai mampu keluar dari goncangan (Kompas.com, 16 Maret 2014).

Anis juga bersuara mengenai hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga yang menunjukkan PKS tidak masuk papan atas, menurutnya hal itu bukanlah suatu parameter karena merupakan media politik dari pihak-pihak tertentu. “Biarkan saja yang merasa mendapatkan posisi bagus dalam survei senang dulu, kader-kader PKS akan terus berjuang dan menunjukkan hasil suara usai perhitungan nanti,” tambahnya (Republika, 10 November 2013). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Anis mengajak para kader untuk tidak terpengaruh dengan adanya survei yang menunjukkan bahwa PKS lemah. Justru hal itu menjadi momentum tersendiri ketika partai lain terlena karena merasa posisinya di atas, PKS mengambil kesempatan untuk terus berjuang memperoleh suara.

Kepemimpinan Anis Matta dinilai berhasil dengan perolehan suara PKS pada Pileg 2014 yang hanya turun 1,09 persen dari Pileg 2009, yang mana itu sangat jauh dari perkiraan lembaga-lembaga survei. Dengan wawasan yang luas dan pengalamannya berkecimpung di PKS, ia mampu mempertahankan kursi PKS meski dilanda isu negatif yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq. Keputusan Anis Matta mengambil posisi kepemimpinan di kala partai sedang dihantam kasus korupsi, kemudian mampu menyelamatkan partai dengan membersihkan isu-isu negatif yang melekat pada partai membuat Anis pantas disebut tokoh karismatik PKS, karena dengan imbauan-imbauan dan pembawaannya yang optimis ia mampu memengaruhi kader dan simpatisan untuk tidak berhenti berjuang.

B. Mekanisme Resolusi Konflik

Pada bagian ini, akan dijelaskan bagaimana sebuah partai politik dapat mengelola dan menghentikan konflik dengan lembaga-lembaga yang sengaja dibentuk untuk menangani masalah-masalah internal partai. Terdapat dua tingkat resolusi konflik yaitu pencegahan konflik dan penghentian konflik, yang dengan sedemikian rupa akan direpresentasikan pada PKS.

1. Pencegahan Konflik

PKS sebagai konsekuensi partai kader memiliki karakteristik yang solid yang didukung oleh pondasi ideologi yang kuat, *leadership* yang relatif baik secara internal dan kader-kader yang militan dalam struktur, baik pusat maupun daerah. Meskipun demikian, kesolidan partai ini tidak seperti yang terdengar dan terlihat di publik. Bahkan dewasa ini sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat faksionalisasi dalam PKS. Di dalam sebuah partai, kemunculan faksi merupakan hasil dari sebuah perbedaan pandangan, strategi dan kepentingan yang tidak terjembatani di antara anggota partai sehingga mengarah pada munculnya sebuah klik atau pengkubuan yang bersifat relatif mapan untuk kemudian saling menanamkan pengaruhnya. Dalam kasus PKS, faksionalisasi muncul akibat adanya perbedaan dan cara pandang antar kader dalam melihat mana tujuan partai yang seharusnya diutamakan. Meskipun beberapa kali petinggi-petinggi PKS membantah kemunculan faksi dalam partai.

Terkait keberadaan faksi di tubuh PKS, seorang anggota dewan dari Fraksi PKS mengatakan bahwa tidak mudah memberikan jawaban “ya” atau “tidak”. Jika

hendak dijawab “ya”, kenyataannya hal tersebut tidak pernah secara terbuka, apalagi formal, diakui keberadaannya. Akan tetapi, jawaban “tidak” juga terlalu naif karena “baunya tercium” (Munandar, 2011: 73). Keberadaan faksi di PKS berawal dari Pemilu Presiden 2004 yang memunculkan spekulasi perpecahan internal partai, di mana saat itu muncul tafsiran mengenai “kelompok idealis” yang mendukung Amien Rais dan “kelompok pragmatis” yang menjagokan Wiranto. Musyawarah Majelis Syura pun akhirnya secara formal mendukung Amien Rais.

Kubu idealis yang menggambarkan kelompok kader PKS yang dipersepsikan lebih idealis disebut “faksi keadilan”, dengan tokoh-tokoh tua di dalam PKS seperti Salim Segaf Al-Jufri, Sohibul Iman, dan Tifatul Sembiring. Sedangkan kubu pragmatis disebut “faksi kesejahteraan” dengan tokoh-tokoh di dalamnya ada Anis Matta, Fahri Hamzah, Mahfudz Siddiq dan kawan-kawannya. Pendukung Anis yang kerap disebut sebagai “kalangan muda” kemudian seperti ditentang oleh tokoh-tokoh “tua” seperti Rahmat Abdullah atau Yusuf Supendi. Pengelompokan muda dan tua ini sebenarnya tidak dapat dikatakan sepenuhnya benar, karena “tokoh tua” seperti KH. Hilmi Aminuddin kenyataannya justru sangat dekat dengan Anis Matta dan kerap meluruskan jalan kalangan muda (Politik.lipi.go.id, 23 April 2013).

Dalam konteks jelang Pemilu 2014, tidak ada konflik yang cukup menguat muncul ke permukaan seperti yang dialami PPP dan Golkar yang mana sempat ada isu penggulingan ketua umum. Namun demikian, penelitian ini mencoba untuk menguraikan konflik internal PKS di antara dua faksi yang tumbuh di dalam partai ini yakni faksi kesejahteraan dan faksi keadilan menjelang Pemilu 2014. Konflik

ini muncul karena kedua faksi memiliki perbedaan pandangan dalam menghadapi permasalahan, yakni terkait respons terhadap kasus LHI dan isu kenaikan BBM pada pertengahan tahun 2013.

Pasca LHI ditetapkan sebagai tersangka, PKS menerjunkan tim hukum yang akan membantu kelancaran sidang Luthfi. Tim hukum ini salah satunya beranggotakan Fahri Hamzah yang berada di faksi kesejahteraan. Tim hukum PKS ini memang tidak mendampingi proses hukum Luthfi secara langsung, tetapi mereka dibentuk untuk bekerjasama dengan tim penasihat hukum Luthfi dengan harapan proses penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan lancar.

Berbeda dengan Fahri, Tifatul Sembiring yang saat itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di era SBY, menilai bahwa semua pihak mesti menghormati keputusan pengadilan. Posisi Tifatul sebagai menteri mungkin menjadi salah satu alasan untuk dia terkesan pasrah dan manut dengan putusan pengadilan terhadap kasus Luthfi. Dengan kasus tersebut, faksi keadilan seakan membuktikan kekhawatiran bahwa pragmatisme politik memang ada. Tifatul berharap semua kader PKS tidak memiliki niat untuk korupsi dan dapat mengambil pelajaran hal tersebut.

”Fakta persidangan harus jadi pelajaran semua orang, bahwa berniat pun sudah dihukum. Fakta persidangan, Pak Luthfi tidak terima uang langsung dari Indoguna. Yang terima (uang) Fathanah dan uang itu belum sampai (ke LHI). Kuota impor belum ditambah. Ini pelajaran bagi semua, khususnya bagi kader PKS, harus sangat berhati-hati, berniat saja tidak boleh,” kata Tifatul (Kompas.com, 10 Desember 2013).

Selain itu, kedua faksi ini juga memicu konflik internal PKS saat pemerintah di 2013 lalu berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Konflik ini pun lagi lagi ditengarai oleh Fahri Hamzah dan Tifatul Sembiring yang

memiliki pandangan berseberangan. Fahri yang saat itu menjabat Wasekjen PKS bersuara keras menolak kenaikan BBM. Dilansir dalam Kompas.com (10 Juni 2013), para elite telah menyampaikan penolakan mengenai hal tersebut bahkan disampaikan juga lewat spanduk-spanduk di jalan-jalan Jakarta, di mana sikap elite PKS itu kemudian dikritik berbagai pihak, termasuk anggota koalisi. Menurut mereka, PKS sebagai anggota Sekretariat Gabungan seharusnya mendukung kebijakan pemerintah.

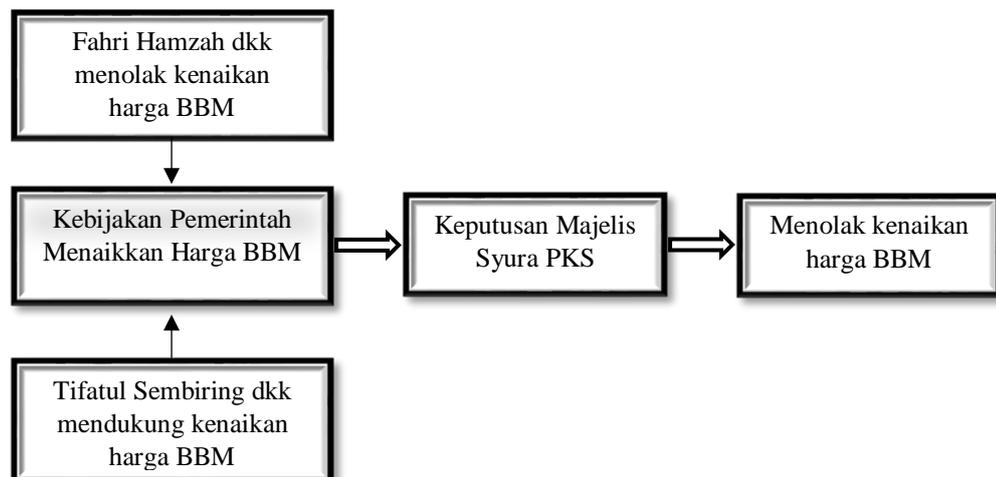
Di samping itu, Tifatul ingin menyarankan partainya untuk mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM, meskipun ia tau bahwa keputusan tetap berada di Majelis Syura. Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhri, sebagaimana dilansir oleh Republika.co.id (19 Juni 2013), sebagai Menkominfo sikap Tifatul sudah benar mendukung pemerintah sebab ia adalah pembantu Presiden SBY, sehingga walaupun ia ingin pindah partai karena sebab PKS tidak sepakat menaikkan harga BBM itu tidak menjadi masalah.

Masih menurut Siti Zuhri (dalam Republika.co.id, 2013), perbedaan pandangan tersebut memunculkan friksi tarik ulur di PKS mengenai posisi mereka di koalisi. Tifatul yang menginginkan PKS mematuhi kebijakan pemerintah dan Fraksi PKS yang tetap menolak kenaikan harga BBM, menunjukkan bahwa perpecahan antara faksi keadilan dan faksi kesejahteraan semakin menguat sehingga PKS hanya akan menunggu dikeluarkan oleh SBY daripada keluar sendiri. Perseteruan yang dipertontonkan elite PKS ini tentu tidak etis dinilai masyarakat. Akan lebih baik jika keduanya tidak banyak mengeluarkan *statement* di hadapan

publik dan membiarkan Majelis Syura yang memutuskan sikap PKS terhadap rencana kenaikan harga BBM.

Berdasarkan penjelasan di atas, perbedaan pandangan kedua faksi tidak menimbulkan konflik yang serius di dalam internal partai. Fahri Hamzah yang awalnya berdiri di garda terdepan untuk membela kasus LHI akhirnya harus menyerah dengan putusan pengadilan. Begitu pula konflik saat isu kenaikan harga BBM yang diilustrasikan pada Gambar 3.1, antara Fahri Hamzah yang menolak dan Tifatul Sembiring yang menginginkan PKS mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM, pada akhirnya Tifatul juga harus manut dengan putusan Majelis Syura yang menolak kenaikan harga BBM. Meskipun PKS sempat diberitakan terpecah karena isu kenaikan BBM, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak memengaruhi soliditas partai menjelang Pemilu 2014.

Gambar 3.2 Pencegahan Konflik Jelang Pemilu 2014



Sumber: Diolah oleh Penulis

Meskipun terdapat faksionalisasi dalam tubuh PKS yang membuat internal partai ini beberapa kali terjadi konflik, namun Majelis Syura sebagai lembaga pembuat keputusan tertinggi dan salah satu elemen dalam mekanisme resolusi konflik (*conflict resolution mechanism/CRM*) dapat menciptakan stabilitas partai karena kader memang diharuskan patuh dengan keputusan Majelis Syura. Berbeda dengan PKS, PKB yang juga sebagai partai Islam tampak mengabaikan mekanisme pengelolaan konflik dengan tidak diaturnya persoalan itu dalam aturan main partai. Noor (2015: 209) mengatakan bahwa kegagalan PKB dalam menginstitutionalisasi atau melembagakan CRM pada akhirnya memberi dampak ketidaktepatan respons atau potensi konflik dan kegagalan melokalisasi konflik sehingga mengurangi kemampuan partai untuk menghindari perpecahan.

2. Penghentian Konflik

Terbentuknya jaring pengaman bagi potensi konflik menjadi salah satu hasil signifikan dari bekerjanya elemen-elemen *conflict resolution mechanism* (mekanisme resolusi konflik internal/CRM). Dengan kata lain, kemampuan untuk mereduksi potensi konflik adalah hasil dari kemampuan partai mendeteksi potensi konflik dan melokalisasinya sejak dini. Di dalam PKS, perangkat/lembaga untuk mendeteksi adanya konflik yaitu *halaqah*, Dewan Syariah, Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO), dan Majelis Syura, yang berdampingan langsung dengan persoalan kehidupan keseharian partai dan kader (Noor, 2015: 274).

Halaqah menjadi media pertama yang menyelesaikan konflik atau perpecahan, baik secara langsung ataupun mengusulkan untuk membawanya

kepada lembaga yang lebih formal, seperti Dewan Syariah atau BPDO. Jika di level *halaqah* penyelesaian potensi konflik bisa secara kekeluargaan, di level Dewan Syariah akan lebih serius dan formal. BPDO sendiri kerap menjadi tempat pengaduan informal pada persoalan tertentu dan menjadi tempat konsultasi pengurus partai di level lokal dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak konflik di internal PKS yang terjadi berkepanjangan dan hanya menjadi tontonan publik tanpa penyelesaian yang jelas.

Masih teringat jelas pada tahun 2010 ketika Yusuf Supendi, salah satu pendiri Partai Keadilan (PK) yang sekarang menjadi PKS, dipecat dengan tuduhan selingkuh dan penggelapan uang. Konflik PKS dengan Yusuf bermula pada tahun 2004 menjelang pilpres, ketika mulai muncul percikan perpecahan di internal PKS. Saat itu suara dukungan PKS pecah terhadap dua calon presiden yaitu Amien Rais dan Wiranto, sehingga untuk meredam hal tersebut dilakukan beberapa kali pemungutan suara dan menghasilkan dukungan terhadap Amien Rais. Pemicu kemarahan Yusuf Supendi yaitu sikap Hilmi Aminuddin sebagai Ketua Majelis Syura yang selalu menggunakan hak veto untuk menggagalkan dukungan tersebut (Kumparan.com, 17 Juli 2018).

Sejak saat itu, Yusuf selalu menjadi tokoh yang mengambil sikap kritis terhadap pelbagai kebijakan PKS. Akibat Yusuf yang sangat vocal mengkritik PKS, pada 2008 partai tersebut mengeluarkan kebijakan yang melarang kader PKS untuk berhubungan dan berinteraksi dengan Yusuf Supendi (Kumparan.com, 17 Juli 2018). Hal tersebut dikonfirmasi oleh Yusuf dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia (dalam cnnindonesia.com, 4 Agustus 2018). Yusuf mengatakan bahwa

saat itu terdapat edaran larangan interaksi dengannya, dan barang siapa yang melanggar maka akan diberi sanksi yang berat. Selain itu, partai tersebut melarang untuk menerima pemikiran Yusuf dalam bentuk apapun, sehingga atas dasar itulah terdapat jarak antara Yusuf dengan kader-kader PKS hingga akhirnya ia dipecat.

Yusuf Supendi yang saat itu membantah tuduhan selingkuh dan penggelapan uang, menganggap SK pemecatannya telah melanggar AD/ART partai. Ia kemudian menyerang balik 10 elite PKS dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meskipun kemudian gugatannya ditolak oleh pengadilan. Yusuf juga sempat melaporkan Hilmi dan Anis ke KPK dengan tuduhan penggelapan dana Pilkada DKI 2007. Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq (dalam Kompas.com, 17 Maret 2011) menilai bahwa laporan yang dilayangkan Yusuf merupakan bentuk kekecewaan atas pemecatannya dari PKS akibat dari pelanggaran kode etik yang dilakukan.

Bertahun-tahun Yusuf menahan geram karena merasa dipecat secara tidak hormat oleh PKS, kemudian mulai bersuara keras lagi pasca penangkapan LHI. Di program ILC TVOne (5 Februari 2013), Yusuf mengatakan bahwa LHI dengan kasus suapnya telah berbuat laknat yang mana ganjarannya sangat dahsyat melebihi korupsi, sehingga menurutnya LHI harus harus membayar sangat mahal yang tidak bisa dihitung dengan uang atau yang lainnya. Pasca tergulingnya LHI, yang terjadi adalah PKS seperti ikan yang berada di dalam kolam sabun, itulah namanya malapetaka dan laknat yang dahsyat seperti yang dikatakan Yusuf. Tak sampai di sana, Yusuf juga mengkritik pernyataan Anis sebagai Presiden PKS yang berbicara masalah taubat setelah kasus LHI. Menurut Yusuf, sangat disayangkan ketika

kalimat tersebut ditujukan untuk internal tetapi diperdengarkan dengan yang lain. Oleh karena itu, pernyataan konspirasi yang dikeluarkan pula oleh Anis diartikan oleh Yusuf sebagai tanda membuka perang dengan yang lain, dan suatu bentuk pembodohan pada internal (kader).

“Dengan terjungkalnya Luthfi Hasan Ishaq, ini laknat, karena dalam kacamata Islam itu korupsi dipotong tangannya, tetapi kalau Luthfi kan kasus suap maka Rasulullah bersabda “Allah SWT melaknat yang menyuap dan disuap”. Oleh karena itu kalau yang mencuri dipotong tangan, kalau yang disuap dia laknat ya dari ubun-ubun sampai kaki lah,” ujar Yusuf di program ILC TVOne (5 Februari 2013).

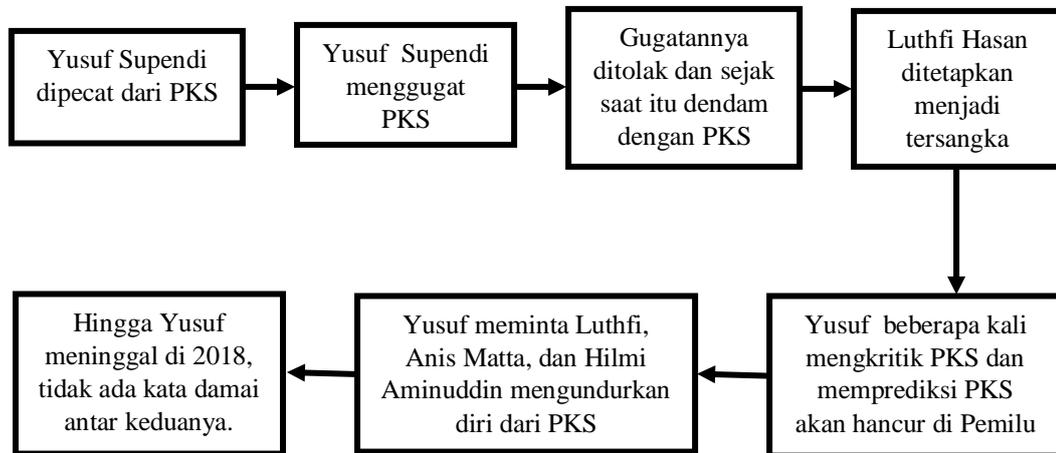
Yusuf yang sebelumnya juga diundang ke program Apa Kabar Indonesia Pagi TVOne (31 Januari 2013) pun mengatakan bahwa penentuan LHI menjadi Presiden PKS pada 2009 merupakan suatu aklamasi dan rekayasa Majelis Syura. Yusuf yang bukan sebagai anggota Majelis Syura tidak terlibat dalam penetapan tersebut, sehingga ia sebagai orang Muslim dan pendiri partai merasa bebas dari segala dosa karena ia tidak memilih LHI. Ia kemudian mengatakan bahwa jika ingin PKS selamat, maka harus ada perombakan internal dengan meminta elite PKS seperti Luthfi, Hilmi dan Anis secara legowo mundur dari jabatan. Tetapi Hilmi dan Anis seakan tutup telinga dengan pernyataan Yusuf dan tidak berkomentar atas tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada keduanya.

Yusuf Supendi yang meninggal pada Agustus 2018, sebelumnya mengaku bahwa tidak ada perdamaian setelah konflik berkepanjangan antara dia dengan elite PKS. Pengakuan Yusuf yang dilansir dalam cnnindonesia.com (4 Agustus 2018) menyebut bahwa ia tidak ada lagi komunikasi dengan Hilmi dan Salim. Menurut penjelasannya, ia sudah kecewa karena pasca pemecatan dirinya, Hilmi sempat menjanjikan tiga kali bertemu di Lembang tetapi dibatalkan melalui orang lain.

Sejak saat itu hingga kematiannya, ia tak mau lagi ke Lembang dan berharap jika Hilmi mempunyai etika baik maka Hilmi yang harus mendatangnya.

Dalam konteks penelitian ini, penghentian konflik akan difokuskan di akhir konflik yang cukup menguat pada saat itu yakni konflik antara Yusuf Supendi dan elite PKS yang diilustrasikan pada Gambar 3.3, di mana Yusuf masih menyimpan dendam karena pada tahun 2010 ia dipecat dari PKS secara tidak hormat. Yusuf yang kemudian sering melontarkan kritikan kepada PKS, terkesan sangat puas ketika salah satu elite PKS yang dibencinya yakni Luthfi Hasan Ishaq ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK karena kasus suap dan meyakini bahwa di Pemilu 2014 PKS akan hancur. Serangan bertubi-tubi yang dilakukannya ke PKS nyatanya tidak dihiraukan oleh elite PKS. Partai tersebut meskipun belum mampu menghentikan konflik dengan Yusuf, namun mencoba meyakinkan publik bahwa dengan dipecatnya Yusuf maka konflik antar keduanya berakhir. Meskipun di sisi lain Yusuf masih merasa didzolimi dan menganggap konflik dengan PKS belum menemukan kata islah (damai) hingga pada detik terakhir kematiannya.

Gambar 3.3 Siklus Konflik Yusuf Supendi dengan Elite PKS



Sumber: Diolah oleh Penulis

C. Kaderisasi Sistematis

PKS dalam AD/ART telah menjelaskan di Pasal 9 bahwa partai menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi anggota. Rekrutmen berfungsi untuk mengisi posisi internal dan anggota parlemen, tetapi bagian ini akan fokus terhadap rekrutmen politik dalam arti anggota parlemen, sedangkan kaderisasi anggota berfungsi untuk melakukan pengembangan kader. Keduanya akan diukur sebagai parameter dari indikator kaderisasi sistematis.

1. Mekanisme Kaderisasi

DPP PKS melalui Departemen Kaderisasi menyediakan seperangkat kurikulum dan pedoman praktis pelaksanaan kaderisasi dan mengomunikasikannya ke seluruh departemen kaderisasi di Indonesia. Partai menyadari bahwa kekuatan utama partai bergantung pada pertumbuhan kader, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas. Sebagai bagian dari pelaksanaan komitmen partai atas

kaderisasi, PKS mengembangkan metode pengembangan kader yang selektif. Menurut AD/ART PKS di Pasal 9 Ayat 4, disebutkan ada enam tingkat kaderisasi yang terbagi dalam dua macam, yakni anggota terbina yang di dalamnya terdapat anggota pemula dan anggota muda, kemudian anggota inti yang di dalamnya terdapat anggota madya, anggota dewasa, anggota ahli, dan anggota purna. Masing-masing tingkatan tersebut dibedakan berdasarkan penempatan serta training dan pelatihan yang telah dicapai.

Agar jenjang keanggotaan dapat meningkat, kader harus mengikuti tahapan-tahapan pelatihan dan kegiatan. PKS mewajibkan kandidat anggotanya untuk mengikuti Training Orientasi Partai (TOP), ketika sudah melalui proses ini maka partai memperkenalkan mereka untuk mengikuti kegiatan *halaqah* dan mekanismenya. Di tingkat praktis, *halaqah* adalah institusi utama proses kaderisasi PKS yang di dalamnya terdapat kegiatan informal seperti *riblah* (kegiatan fisik), *daurah* (kajian insentif), *mabit* (kegiatan bermalam untuk meningkatkan spiritual), dan seminar. Karena *halaqah* dianggap unsur yang penting maka Departemen Kaderisasi di setiap kepengurusan lokal harus menjamin keberlanjutannya (Noor, 2015).

Menjelang Pemilu 2014, Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa elektabilitas PKS mengalami penurunan dibanding Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, yakni di angka 6,1 persen (Beritasatu.com, 27 Februari 2014). Menurut Direktur LSIN, Yasin Mohammad sebagaimana dikutip oleh Beritasatu.com (27 Februari 2014), akar kehancuran PKS adalah tidak adanya kesepahaman atau sevisi para kader PKS. Menurutny,

kehancuran PKS dimulai saat partai itu mulai memosisikan diri sebagai partai yang inklusif dengan menerima kader non-Muslim. Sejak sistem kaderisasi di PKS berubah total, kader yang menduduki jabatan penting di PKS tidak lagi didasarkan pada sosok pribadi yang telah memiliki kualitas keagamaan yang unggul dan melalui proses panjang sistem kaderisasi di internal PKS. Penentuan calon kepala daerah yang diusung dan rekrutmen caleg PKS juga dianggap tidak mempertimbangkan kualitas kader.

“Peran kader berkualitas PKS tidak bisa berbicara banyak di ranah politik. Padahal mesin politik PKS digerakkan oleh kader-kader berkualitas tersebut, dengan semangat militansi yang luar biasa,” kata Yasin (Beritasatu.com, 27 Februari 2014).

Setelah lebih dari satu dasawarsa berkiprah di kancah politik Indonesia, PKS mulai mempertimbangkan untuk melegalformalkan keanggotaan kalangan non-Muslim pada 2010 lalu. Saat ide keanggotaan non-Muslim disampaikan di Sidang Majelis Syura PKS, beberapa anggota Majelis Syura keberatan dengan hal tersebut. Mereka khawatir dengan dibukanya ruang bagi kalangan non-Muslim, akan berimbas terhadap basis massa PKS yang berasal dari kalangan Muslim.

“Mereka hanya ingin berhati-hati saja. Tapi, setelah dijelaskan bahwa Islam bersifat terbuka dan berorientasi untuk mendatangkan kemaslahatan umat, semua anggota Majelis Syura akhirnya sepakat,” ujar Mahfudz Shiddiq (Kompas, 18 Juni 2010).

Di dalam AD/ART baru memang tidak secara eksplisit mengatur klausul keanggotaan non-Muslim. Tidak ditemukan kalimat yang menjelaskan secara jelas bahwa kalangan non-Muslim bisa menjadi anggota PKS. PKS hanya membagi keanggotaan menjadi dua kategori, yaitu kader dan anggota. Kader adalah anggota yang terikat penuh dengan AD/ART partai dan terikat penuh dengan sistem kaderisasi yang berbasis keislaman. Sedangkan yang masuk kategori anggota

adalah setiap WNI yang terikat penuh dengan organisasi. Sehingga anggota bersifat lebih umum dan terbuka bagi siapapun dan dari golongan serta agama apapun (Kompas.com, 18 Juni 2010).

Legalisasi keanggotaan non-Muslim terjadi bukan tanpa alasan, karena berdasarkan pertimbangan semakin banyaknya pendukung PKS dari kalangan non-Muslim di Indonesia Timur, seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Tidak heran jika saat ini sebagian besar anggota DPRD dan pengurus PKS di daerah berstatus non-Muslim, karena memang minimnya jumlah penduduk Muslim di wilayah tersebut. Misalnya di Biak, sekitar 60 persen dari 25 caleg DPRD beragama Kristen. Hal itu tidak dipermasalahkan karena harapannya dengan dukungan caleg non-Muslim dapat mendongkrak perolehan suara PKS di pesta demokrasi Pileg 2014 (Jpnn.com, 8 April 2014).

Pernyataan menarik disampaikan oleh Abdul Munir Mulkan sebagaimana yang dilansir oleh Kompas.com (18 Juni 2010), yang menilai bahwa sikap untuk membuka ruang bagi non-Muslim untuk menjadi anggota DPRD di Papua sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi sebagai salah satu sumber inspirasi partai-partai yang mengadopsi pemikiran gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, termasuk PKS di Indonesia. Pada kondisi tertentu, partai Islam boleh bersikap pragmatis sepanjang itu hanya menjadi strategi untuk merealisasikan tujuan-tujuan ideal semata.

Meskipun demikian, Munir dalam Kompas.com (18 Juni 2010) meyakini bahwa non-Muslim tidak akan dilibatkan dalam Majelis Syura PKS. Menurutnya, jika anggota Majelis Syura sudah ada yang berasal dari non-Muslim, maka menandakan bahwa ideologi PKS telah berubah karena Majelis Syura adalah

pimpinan tertinggi partai dan di sana lah segala kebijakan partai ditentukan. Dengan demikian, ideologi PKS tetap terjaga meskipun PKS sudah mendeklarasikan sebagai partai terbuka dengan menerima anggota non-Muslim. Hal ini dapat menjadi pedoman bagi PKS karena terbukti hingga sekarang anggota Majelis Syura tidak ada yang berstatus non-Muslim.

Dalam konteks jelang Pileg 2014, Sekjen PKS Taufik Ridho sebagaimana yang dilansir dalam Republika.co.id (22 April 2013) mengatakan bahwa partainya untuk DPR Pusat akan mengusung dua caleg non-Muslim dari dapil Papua dan Papua Barat. Akan tetapi, pada kenyataannya data KPU Pusat menunjukkan tidak ada satu pun caleg PKS di tingkat nasional berlatar belakang non-Muslim yang maju menjadi kandidat Pemilu Legislatif 2014. Meskipun sejumlah provinsi didominasi penduduk non-Muslim seperti Bali, Sulawesi Utara, NTT, dan Papua, tetapi data di website resmi KPU (kpu.go.id) menunjukkan bahwa tidak ada satu pun caleg non-Muslim. Data ini menunjukkan bahwa sulit bagi non-Muslim untuk maju menjadi caleg PKS, sehingga sulit dikatakan PKS sebagai partai terbuka meskipun pada tahun 2008 partai ini telah mendeklarasikan sebagai partai terbuka.

2. Rekrutmen Politik

Salah satu fungsi partai politik adalah melaksanakan rekrutmen politik, yaitu mencari dan menemukan orang yang dalam topik ini diseleksi dan dipersiapkan untuk menjadi calon-calon anggota legislatif. Partai politik yang terbuka akan memilih calegnya dari internal dan eksternal partai. Dalam proses

rekrutmen politik dilakukan melalui beberapa tahap, dan keduanya tentu memiliki prosedur rekrutmen politik yang berbeda.

Dalam memutuskan kader mana yang akan mewakili partai di pemilihan umum, PKS membuat sejumlah tahapan evaluasi untuk menelaah secara mendalam kemampuan politik dan kepribadian kandidat, yang akhirnya akan menentukan kelayakan mereka. Partai juga menyelenggarakan pemilihan internal sebagai proses untuk memutuskan siapa saja yang dapat menjadi caleg. Melalui proses transparan yang melibatkan banyak kader, partai dapat menghindari kecenderungan kolusi dan nepotisme. Hal ini karena elite partai bukanlah satu-satunya pihak yang terlibat dan menentukan proses rekrutmen, melainkan juga ribuan kader inti yang harus pula dipertimbangkan aspirasi dan pendapatnya (Noor, 2015: 345).

Selain mengusulkan kader sendiri untuk diusung sebagai caleg, PKS yang sejak 2008 lalu mendeklarasikan diri menjadi partai terbuka juga membuka peluang bagi pihak luar terutama pakar atau tokoh masyarakat untuk dapat mewakili PKS di parlemen. Menurut Siddiq (dalam Noor, 2015), untuk rekrutmen jenis ini, partai membentuk tim yang dapat menyeleksi kualitas tokoh yang berpotensi sebagai kandidat. Setelah nama-nama kandidat yang layak diputuskan, partai akan membangun pendekatan personal untuk meyakinkan mereka agar bersedia menjadi caleg PKS dan membuat kesepakatan antara partai dan kandidat.

Dalam konteks penelitian ini, PKS dalam menjaring caleg eksternal akan memilih orang yang memiliki dukungan di luar massa PKS. Hal itu disampaikan oleh salah satu pimpinan DPP PKS Nasir Djamil yang sebagaimana dilansir oleh *Sindonews.com* (29 Januari 2013), yang juga mengatakan bahwa partainya lebih

mendorong kader internal yang sudah teruji kemampuannya sehingga pada di Pileg 2014 PKS tidak mengusung caleg artis. Hal ini terkonfirmasi oleh Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid (dalam Kompas.com, 9 April 2013) yang mengatakan bahwa tidak ada satu pun artis yang masuk dalam daftar caleg PKS. Ia menambahkan bahwa partainya bukan lah anti-artis, melainkan lebih mengutamakan kaderisasi yang dirasa sudah cukup memenuhi kualifikasi. Namun PKS pada Pileg 2014 juga membuka ruang bagi caleg eksternal, yang mana syarat dan kriterianya juga ditentukan oleh kebijakan dan keputusan dari petinggi PKS.

“Yang penting caleg eksternal memiliki *aqidah ahlussunah wal jamaah*, ibadah yang lurus, fisik yang sehat, kredibel dan memiliki kompetensi kapasitas sebagai anggota dewan kelak jika terpilih,” ujar Nasir dalam Sindonews.com (29 Januari 2013).

PKS sendiri mengajukan tiga syarat untuk bisa menjadi calon legislatornya di Pileg 2014. Pertama, tidak memiliki catatan hukum, lalu tidak mempunyai cacat moralitas, dan yang terakhir memiliki keluarga yang relatif stabil (Detik.com, 25 Januari 2013). Syarat yang tertuang dalam UU No.8 tahun 2012 tentu yang terpenting, tetapi tiga syarat di atas menjadi pertimbangan kuat PKS untuk menentukan calegnya. Persyaratan tersebut dibuat bukan tanpa alasan. Persyaratan bersih dari catatan hukum dan amoralitas bukan merupakan persyaratan politik, melainkan sudah melekat dalam sifat PKS yang mengusung Islam sebagai dasar sehingga persyaratan moral sangat ketat. Terbukti selama tiga periode PKS relatif tidak ada anggota yang terjerat kasus. Kemudian maksud dari keluarga yang relatif stabil adalah dilihat dari pendidikan anak dan keluarga yang harmonis. PKS akan melakukan penilaian pada kapasitas masing-masing caleg untuk penempatan di komisi-komisi.

“Pendidikan ini untuk nanti kita menentukan dalam komisi, kami cari kecukupan sejumlah orang untuk komisi yang ada. Kami melihat kompetensi itu penting karena kalau dibagi ke komisi harus punya basis kompetensi pendidikan memadai,” ujar Anis Matta.

Persyaratan untuk caleg PKS tersebut berhasil menyaring kandidat-kandidat terpilih yang berkualitas dan mempunyai kompetensi, baik laki-laki maupun perempuan. Para kandidat diharapkan dapat bekerja dan memberikan kontribusi yang nyata untuk masyarakat, tidak hanya duduk manis ketika sudah menjadi anggota dewan. Pada Pileg 2014 lalu, PKS mengusung calon anggota legislatif sejumlah 492 orang dengan jumlah caleg perempuan mencapai 38,8 persen atau sebanyak 191 orang (Kompas.com, 19 April 2013). Menurut Anis Byarwati selaku Ketua Bidang Perempuan DPP PKS (dalam Kompas.com, 19 April 2013), calon anggota legislatif perempuan dari PKS mesti hadir dari keluarga yang harmonis, itu merupakan penilaian dan syarat utama. Selain itu, PKS memiliki aturan bahwa di dalam satu keluarga hanya boleh suami atau istri saja yang maju menjadi caleg.

Beberapa tokoh PKS mengemukakan bahwa caleg harus memiliki keluarga yang harmonis dan stabil. Hal tersebut dijadikan syarat dengan alasan keluarga merupakan cerminan masyarakat. Dengan memiliki keluarga yang harmonis dan stabil, para caleg nantinya diharapkan dapat menularkan dan membawa pengaruh bagi masyarakat. Di dalam PKS, peran perempuan sendiri juga cukup signifikan. Salah satu program di mana para calon ini turun adalah program Indonesia Cinta Keluarga. Perempuan yang di dalam keluarga merupakan seorang ibu, jika memiliki kepribadian yang baik maka keluarga juga lebih mudah mencapai kesejahteraan. Program ini diharapkan akan berdampak pada terbentuknya masyarakat dan bangsa yang berkualitas (Kompas.com, 19 April 2013).

Tabel 3.1 Data Profil Caleg PKS 2014 untuk DPR RI

Kategori	Keterangan	
Jenis Kelamin	Laki-laki: 301 orang (61,2 persen)	Perempuan: 191 orang (38,8 persen)
Keterlibatan Artis	Tidak ada satu pun artis masuk daftar caleg PKS	
Keterwakilan non-Muslim	Tidak ada satu pun non-Muslim masuk daftar caleg PKS	

Sumber: Diolah oleh Penulis

Penjelasan Tabel 3.1 menunjukkan bahwa PKS serius dalam menjaring caleg, baik yang internal maupun eksternal. Meskipun partai ini membuka jalan bagi non-kader termasuk artis untuk dapat mencalonkan diri sebagai caleg, namun tidak mudah untuk lolos karena PKS hanya akan mencari kandidat yang memang sejalan dengan visi dan misi partai, bukan hanya bermodalkan popularitas. Tidak seperti partai Islam lainnya seperti PAN, PKB, dan PPP yang masing-masing mengusung caleg artis. Hal ini yang membedakan PKS dengan partai lainnya. Selain itu, PKS telah berhasil memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dengan jumlah caleg perempuan mencapai 38,8 persen di seluruh daerah pemilihan.

D. Komitmen terhadap Nilai-Nilai Bersama atau Ideologi

Bagian ini akan menjelaskan dua hal, yakni platform partai dan komitmen kader. Platform partai akan berbicara mengenai sejauh mana PKS memperjuangkan nilai-nilai Islam, dan komitmen kader akan membahas tentang personal kader sendiri dalam menjalankan nilai-nilai tersebut, tentunya dalam konteks jelang Pileg 2014.

1. Platform Partai

PKS sejak awal kemunculannya dalam wujud Partai Keadilan (PK) secara konsisten menyatakan diri sebagai “Partai Dakwah”. Sebagai partai dakwah, PKS menjadikan perjuangan dakwah sebagai *central value* dalam gerak langkah kehidupan partai dan para kadernya. Partai ini meyakini bahwa keberadaan partai merupakan bagian upaya dakwah. Pembukaan AD/ART partai ini pun menyatakan bahwa partai dibentuk untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah (Noor, 2015: 404).

Berbicara tentang ideologi dan pemilu, saat ini PKS seperti sedang mendayung di antara “dua karang”, yakni memilih strategi partai sebagai representasi basis sosial atau logika kompetisi elektoral (Muhtadi, 2012: 222). Apabila PKS memilih untuk mengedepankan representasi basis sosial partai, maka menjadi partai ideologis adalah pilihan yang tepat. Akan tetapi, konsekuensi menjadi partai ideologis terbukti membuat cakupan pemilih PKS terbatas, sehingga sulit bagi partai ini untuk memenangkan pemilu atau sekadar masuk tiga besar suara tertinggi. Walaupun mayoritas pemilih di Indonesia adalah Muslim, tetapi tidak berbanding lurus dengan jumlah suara partai Islam karena masyarakat menilai perilaku partai yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Pada Platform Kebijakan Pembangunan PKS, ditegaskan kembali karakteristik PKS sebagai partai dakwah, hanya saja bukan sekedar bekerja *struggle of power* secara struktural politik 5 tahunan dalam bingkai pemilu, melainkan juga sebagai partai yang menjalankan kerja-kerja kultural dalam pembangunan umat dan peradaban. Di dalam konteks inilah dapat dijabarkan tekad PKS sebagai sebuah

institusi dakwah yang mengusung prinsip dan komitmen *bersih, peduli, dan professional*. Surapranata sebagaimana dikutip dalam MPP PKS (2008) menjelaskan bahwa PKS telah menunjukkan dan akan terus menjaga gerakan bersih dan peduli baik di lapangan kultural pelayanan masyarakat maupun di dalam aktivitas struktural parlementer. Di lapangan eksekutif di pusat dan daerah, kader-kader PKS membuktikan dirinya tidak hanya bersih dan peduli, tetapi juga professional berkhidmat kepada rakyat dalam rangka mensejahterakan mereka.

Dalam sebuah diskusi platform kebijakan pembangunan PKS, politikus PKS Sohibul Iman sebagaimana dilansir oleh Sindonews.com (7 Januari 2014) menjabarkan platform visi, misi, dan prioritas PKS tahun 2014. Dengan ideologi berbasas Islam, PKS sadar apa yang menjadi dasar dan bahan inspirasinya adalah Islam.

“Dalam realita, prinsipil ideologi itulah Islam, kami ejawantahkan salah satunya dalam keadilan. Falsafah dasar perjuangan, keadilan di dalam politik bisa dicapai dengan itu sendiri, keadilan dalam sosial kita berbicara tentang kesetaraan,” ujar Sohibul (Sindonews.com, 7 Januari 2014).

Sohibul memaparkan bahwa kemiskinan di Indonesia terdapat dua sektor, yakni di sektor pertanian dan sektor informal perkotaan, dan PKS sendiri sudah menyiapkan tiga langkah utama. Di sektor pertanian, PKS mempelajari dari yang sangat moderat dan radikal sampai kepada *land reform* guna meningkatkan penghasilan petani. Kemudian, mengurangi kemiskinan perkotaan dengan menciptakan lapangan kerja baru dan industrialisasi yang harus punya daya saing. Yang terakhir, untuk menciptakan negara yang *sustainable*, maka harus meningkatkan kreatifitas dan menciptakan sumber daya yang baru, salah satunya

dengan mengembangkan sektor kelautan. Karena menurutnya, hanya dua sektor yang sulit diambil negara lain, yakni sektor kelautan yang sangat luar biasa dan perkembangan mutakhir dan inovasi, dimana wirausahawan menjadi fokus perhatian PKS (Sindonews.com, 7 Januari 2014).

Dalam konteks penelitian ini, selain platform visi, misi, dan prioritas PKS di tahun 2014 yang berasaskan Islam, hal lain yang membuktikan bahwa PKS berkomitmen dengan ideologinya yaitu tidak ada satu pun non-Muslim yang masuk dalam daftar caleg PKS untuk DPR RI. Hal ini membuktikan bahwa meskipun pada 2008 PKS sudah mendeklarasikan menjadi partai terbuka, ideologi Islam masih melekat pada jiwa partai ini sehingga tidak mudah bagi non-Muslim menyalonkan diri menjadi caleg PKS.

Selain itu, karena perbedaan ideologi yang sangat mencolok dan ekstrem, PKS belum pernah berada dalam satu koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal ini pertama dibuktikan dengan PKS yang tidak pernah satu koalisi dengan PDIP di tingkat nasional. Kedua, jika presiden diusung oleh PDIP (seperti Megawati dan Joko Widodo), PKS juga tidak berada dalam lingkaran pemerintah. Komitmen PKS terhadap ideologi dan PDIP yang terlalu “kiri” membuat keduanya di tingkat nasional tidak pernah berada dalam satu koalisi.

Dalam konteks jelang Pemilu 2014, terdapat tiga hal yang menjadi fokus penelitian yakni adanya platform dan prioritas partai yang berasaskan Islam, tidak adanya caleg non-Muslim, dan sikap politik PKS yang tidak berkoalisi dengan PDIP karena ideologi yang begitu berseberangan. Pasca kasus LHI, kepercayaan masyarakat terhadap partai Islam khususnya PKS yang identik dengan partai bersih

mulai hilang. Namun dengan beberapa keputusan dan sikap partai di atas memperkuat komitmen PKS terhadap ideologinya sehingga memupuk kembali kepercayaan masyarakat.

2. Komitmen Kader

PKS dengan ideologi yang berlandaskan Islam membawa harapan bahwa kader-kadernya memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai bersama dan tidak menyimpang dari ideologi partai. Dalam upaya mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai bersama PKS mengembangkan infusi ideologi. *Halaqah* pada level kader biasa atau *usrah* pada level elite partai atau juga kerap secara formal disebut sebagai Taklim Rutin Mingguan (TRM) menjadi salah satu media terpenting dari infusi ideologi ini. Proses ini tidak berhenti meskipun kader telah menempati posisi publik yang penting, seperti anggota parlemen atau kepala daerah.

Kegiatan infusi ideologi PKS diisi dengan penyampaian materi-materi yang merujuk pada nilai-nilai yang ada atau merupakan implementasi dari nilai-nilai itu. Kemudian terdapat materi-materi politik yang wajib dikuasai seperti materi mengenai ketaatan, terutama tema mengenai *qiyadah wal jundiyah*, pentingnya kebersamaan, dan politik dakwah. Materi tentang akhlak ataupun kaidah Islamiah dan peningkatan kualitas diri secara personal juga turut disampaikan dalam *halaqah*.

Kegiatan-kegiatan dalam memelihara nilai-nilai bersama untuk menjaga komitmen kader di atas terbukti membawa PKS mewujudkan cita-cita partai untuk menjadi partai yang bersih. Citra partai bersih PKS kemudian tercoreng setelah

ditetapkannya Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi pada 31 Januari 2013. Luthfi merupakan orang pertama yang menorehkan catatan baru yang dianggap badai politik oleh PKS karena kasus tersebut bergulir menjelang Pemilu Legislatif 2014.

Meskipun pimpinan PKS telah mencoreng citra bersih partai, PKS tetap mendapat predikat partai terbersih di tahun 2014. Salah satunya dibuktikan dengan laporan tren korupsi yang disusun oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW membuat laporan tersebut dengan bergantung pada publikasi penanganan kasus korupsi di media massa, terutama media online yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Di Maret 2014, ICW merilis laporan yang menunjukkan bahwa partai politik terkorup adalah PDI-P yang menduduki urutan pertama dengan 84 kasus korupsi, dan disusul Partai Golkar dengan 60 kasus. Sementara itu, dua partai terbawah diduduki oleh PKS dengan 2 kasus dan PKPI 1 kasus (ICW, 29 Maret 2014). Hal ini membuktikan bahwa kader-kader PKS mampu berkomitmen dengan cita-cita partai yang bersih dari korupsi.

Selain itu, pasca penangkapan LHI, kader-kader PKS di daerah berharap kasus LHI tidak memengaruhi suara partai di Pemilu 2014. Meskipun mereka merasakan kekecewaan, banyak kader di daerah yang sudah memahami kasus ini sebagai resiko berpolitik, hal ini disampaikan oleh Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Faqih sebagaimana dilansir oleh Beritasatu.com (1 Februari 2013). Fikri juga mengatakan bahwa kasus yang menimpa petinggi PKS dapat menjadi hikmah dan pembelajaran bagi partai agar lebih waspada, karena sebagai partai

yang mengusung tagline partai bersih harus diikuti dengan sikap yang penuh tanggung jawab (Beritasatu.com, 1 Februari 2013).

“Karena sudah berkali-kali menghadapi kasus korupsi, seperti dulu kasus yang menimpa Hilmi dan Sekjen Anis Matta (tetapi tidak terbukti), dua tokoh yang sangat dikagumi dan dihormati kader, makanya saat kasus yang menimpa Presiden PKS, banyak kader yang sudah paham, tak terlalu terkejut. Mereka bilang bahwa ini serangan buat partai,” ujar Fikri (Beritasatu.com, 1 Februari 2013).

Anis Matta yang baru ditetapkan menjadi Presiden PKS pun juga berkeliling ke daerah untuk memastikan komitmen kader partai, salah satunya dengan mengadakan konsolidasi kader di Bali. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantapkan komitmen untuk meraih posisi tiga besar pada Pemilu 2014. Ketua DPW PKS Bali, H. Mudjiono sebagaimana yang dilansir dalam Kompas.com (12 Februari 2013) mengatakan bahwa konsolidasi kader di Bali merupakan acara penutup dari rangkaian konsolidasi kader tahap pertama yang digelar Presiden PKS.

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian yang dilakukan, kekecewaan kader PKS terhadap kasus LHI tidak menciutkan semangat mereka untuk berjuang pada Pemilu 2014. Hal ini terbukti dengan tidak adanya kader partai yang mengundurkan diri pasca kasus tersebut. Meskipun banyak yang memprediksi PKS akan hancur pada 2014, kader di pusat maupun daerah tetap bersatu demi mewujudkan target partai untuk memperoleh tiga besar di Pileg 2014. Sikap kader tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya *halaqah* dan berbagai pelatihan lainnya yang juga menanamkan rasa loyalitas kepada setiap kader. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kader PKS memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan

nilai-nilai bersama partai dan membuktikan bahwa PKS mampu memelihara soliditasnya meskipun badai menerjang internal partai.

PKS sebagai partai kader dikenal memiliki karakteristik yang solid dengan didukung oleh landasan ideologi yang kuat. Meskipun faksionalisasi di tubuh PKS terlihat jelas di beberapa situasi karena perbedaan pandangan, namun hal tersebut belum pernah menimbulkan konflik yang mengancam soliditas partai. Kasus yang dialami Presiden PKS menjadi ujian terberat partai karena bertepatan dengan tahun politik yakni menjelang Pemilu 2014. PKS yang kemudian “diramal” akan hancur di 2014 terbukti dapat memelihara soliditasnya karena partai ini memiliki sistem kepemimpinan prosedural, mekanisme resolusi konflik yang baik, kaderisasi yang sistematis, dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai bersama/ideologi.